



GRAHA WIDYA PRAJA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU



2017

Jateng
gayeng

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja dibidang pengembangan sumber daya aparatur.

Dalam laporan PPID tahun 2017 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi yang diawali dengan membuat web portal BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> dan web khusus Informasi Publik di website <http://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id>. Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID BPSDMD melalui website selain melalui akses langsung (face to face) desk Ruang Layanan Informasi.

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga mencatat permohonan informasi yang signifikan di tahun 2017 terkait kinerja, kegiatan dan program. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan.

Pencapaian kinerja PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 cukup mengembirakan dengan meraih Predikat Badan Publik Menuju Informatif Peringkat 6 dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada bulan November 2017.

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Semarang, Januari 2018

**Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

selaku
PPID Pembantu,

Drs. BUDI SANTOSO, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19600226 198411 1 001

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

I. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID pada badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menandakan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik khususnya dibidang kediklatan aparatur, sesuai dengan yang tercantum di Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, baik secara langsung maupun tidak langsung sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan sosialisasi PPID lingkup BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sejak awal tahun 2017 PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meluncurkan media khusus PPID dengan alamat <http://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/>, dengan maksud untuk memperkenalkan PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat yang berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, form layanan dan leaflet PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tahu tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 27 Tahun 2015 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
9. Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor :

800/00063/2017 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

10. Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800 / 00072 / 2017 tentang SK Penetapan Klasifikasi Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Profil PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Nama Instansi	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Provinsi Jawa Tengah
PPID Pembantu	: Drs. Budi Santoso, MM
Alamat	: Jl. Setiabudi 201 Semarang Kode Pos 50263
Telepon	: 024 7473066 ext. 666
Faksimile	: 024 7473701
Email	: bpsdmd@jatengprov.go.id
Website	: http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Website PPID	: http://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id
Twitter	: @bpsdmdjtg
Instagram	: @bpsdmdjtg
Facebook	: @bpsdmdjtg
Whatsapp / sms	: 0811 281 5000

B. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00063/2017 tentang Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, PPID Pembantu BPSDMD terdiri dari :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
2. PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
3. Bidang Pengelola Informasi sebanyak 13 orang;
4. Bidang Pelayanan Informasi sebanyak 6 orang;
5. Bidang Pendokumentasian dan arsip sebanyak 3 orang;
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 6 orang.

C. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas, Tim Pelaksana PPID Pembantu BPSDMD memiliki fasilitas Ruang Layanan Informasi yang sekaligus merupakan ruang sekretariat PPID, didalamnya dilengkapi fasilitas :

a. Ruangan Desk Layanan Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk layanan informasi publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Pusat Administrasi yaitu Graha Widya Praja berlokasi di Lobby Lantai I yang dijadikan sebagai Ruangan Khusus Layanan Informasi.

Ruangan Layanan Informasi Publik terdiri dari :

- 1) 4 unit meja dan kursi layanan
- 2) 5 unit kursi layanan
- 3) Ruang tunggu dengan 1 set meubelair
- 4) 5 unit komputer
- 5) 2 unit printer
- 6) 1 unit Scanner
- 7) 1 unit Kamera DSLR
- 8) 1 unit Handycam
- 9) 1 unit tripod
- 10) 1 rak untuk dokumen, CD/DVD dan Flashdisk / hard disk.
- 11) 1 unit TV Plasma 60 inch
- 12) 2 unit TV LED 40 inch
- 13) 1 unit Laptop
- 14) 1 unit Mini Proyektor
- 15) 1 unit Mini PC
- 16) 1 unit Harddisk Eksternal
- 17) 2 unit interactive whiteboard with touchscreen display ukuran 85 inch
- 18) 1 unit akses point.

Gambar Ruang Desk Layanan Informasi dan Ruang Tunggu



b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain :

1) Menyediakan menu Informasi Publik di webportal BPSDMD dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>

2) Media Informasi Publik dengan alamat <http://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/> yang didalamnya berisi tentang :

- 1) Profil PPID
- 2) Daftar dan Jenis Informasi Publik
- 3) Mekanisme Layanan Informasi Publik
- 4) Pelaporan Pengelolaan informasi Publik
- 5) Media Publikasi dan Link Open Data
- 6) Galeri Kegiatan
- 7) Media komunikasi bagi publik untuk menyampaikan permohonan informasi

c. Papan Pengumuman

Selain itu untuk menunjang pelayanan informasi publik disediakan pula leaflet informasi publik dan standing banner terkait

- pendaftaran peserta dan sewa gedung.
- d. Penyediaan Kotak Saran yang terletak di :
 - 1) Lobby
 - 2) Ruang makan
 - 3) Gedung Pendidikan dan Perpustakaan
 - e. Penyediaan Layanan kepuasan masyarakat interaktif yang terletak di lobby Graha Widya Praja
 - f. Membuat leaflet PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 jenis leaflet yaitu :
 - 1) PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Hak Anda Untuk Tahu
 - g. Membuat x banner sebanyak 8 unit yaitu tentang :
 - 1) Media Informasi
 - 2) Alur Layanan Informasi Publik
 - 3) Alur Pengaduan
 - 4) Alur dan Informasi Sewa Gedung
 - 5) Anti Gratifikasi & Anti Korupsi
 - 6) Kegiatan Tahun 2017
 - h. Menetapkan Visi dan Misi PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) Visi : Mewujudkan tata kelola informasi publik yang mudah, cepat dan murah
 - 2) Misi :
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung
 - b) Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab
 - c) Mengembangkan sistem pelayanan berbasis online
 - i. Menetapkan Motto layanan PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah: " Pelayanan mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab. "

- j. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :



- k. Menetapkan Alur Layanan Publik melalui SOP yang ditandatangani oleh Kepala BPSDMD Jawa Tengah, diantaranya :
- 1) Alur Sewa Gedung
 - 2) Alur Pengaduan
 - 3) Alur Pendaftaran Peserta Diklat
- l. Pengembangan aplikasi, seperti :
- 1) Alona : Aplikasi Layanan Open Data
 - 2) Infografis : Aplikasi Data Sektoral BPSDMD
 - 3) E-public : Aplikasi Layanan Informasi

2. **Kegiatan ke-PPID-an :**

- a. Partisipasi dalam Kegiatan :
- 1) Sinkronisasi Program Kegiatan 2017 berbasis Sistem Aplikasi, integrasi infrastruktur TIK dan program single data di Semarang - 8 Februari 2017
 - 2) Rakor Bakohumasdi Solo - 21 – 22 Februari 2017
 - 3) FGD Keterbukaan Informasi Berbasis Open Data di Semarang - 23 Februari 2017
 - 4) E-government Bootcamp di Semarang - 7-8 Maret 2017
 - 5) Bintek Proxi Humas di Semarang - 20 Maret 2017
 - 6) Pelatihan admin twitter kemala di Semarang - 17 Mei 2017
 - 7) FGD Keterbukaan Informasi Berbasis Open Data Putaran II di

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto - 23 Mei 2017

- 8) Forum Data dan Sosialisasi Aplikasi Open Data di Semarang - 21 Agustus 2017
- b. Pelayanan Permohonan Informasi dalam Kunjungan :
 - 1) BPSDMD Provinsi NTT - Tanggal : 16 Maret 2017
 - 2) PPSDMD Kemenhub – 20 April 2017
 - 3) BPSDMD Kemendagri – 21 Januari 2017
 - 4) BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau – 23 Maret 2017
 - 5) PPSDMD Kemenkeu – 19 April
 - 6) BPSDMD Provinsi Bengkulu - 27 April 2017
 - 7) BPSDMD Provinsi Sumatera Utara - 27 Juli 2017
 - 8) BPSDMD Provinsi Kalimantan Tengah -8 Agustus 2017
 - 9) Mahasiswa National School of Management Marocco – 4 Agustus 2017
 - 10) Mahasiswa Oxfam Inggris – 25 Agustus 2017
 - 11) Badan Diklat Provinsi Jawa Timur – 15 Agustus 2017
 - 12) Rapat Rutin PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- c. Agenda : koordinasi tim pelaksana PPID Pembantu, waktu : 17 Februari 2017
- d. Evaluasi Tata Kelola Informasi Publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, waktu : 27 November 2017

3. Anggaran

Dalam pelaksanaan pelayanan tata kelola informasi publik, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyediakan anggaran untuk kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID yang dialokasikan untuk kegiatan Uji Konsekuensi, cetak (banner, flyer, leaflet dan spanduk) serta Kegiatan Evaluasi Tata Kelola Informasi Publik yang masuk ke dalam Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

IV. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 08.00 – 15.30 WIB sedangkan pada hari Jumat dari jam 08.00 – 16.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung dengan datang ke Ruang Layanan Informasi di Gedung Graha Widya Praja – BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi Nomor 201 A Semarang maupun tidak langsung melalui email ke alamat bpsdmd@jatengprov.go.id serta website resmi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> atau melalui jejaring sosial twitter, instagram dan facebook dengan akun @bpsdmdjtg

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 :

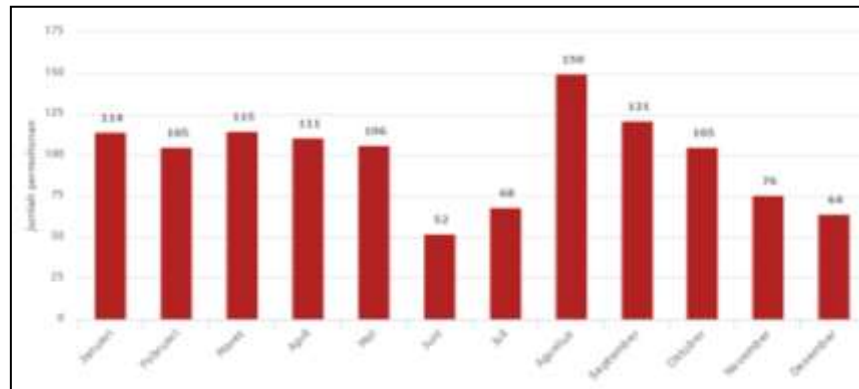
- a. Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2017 sebanyak 1187 pemohon
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 1187 dan yang ditolak 0 (tidak ada).
- c. Rincian layanan informasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL 1. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2017

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	114	0	-	114
2	Februari	105	0	-	105
3	Maret	115	0	-	115
4	April	111	0	-	111
5	Mei	106	0	-	106
6	Juni	52	0	-	52
7	Juli	68	0	-	68
8	Agustus	150	0	-	150
9	September	121	0	-	121
10	Oktober	105	0	-	105

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
11	November	76	0	-	76
12	Desember	64	0	-	64
	Jumlah	1187	0	-	1187

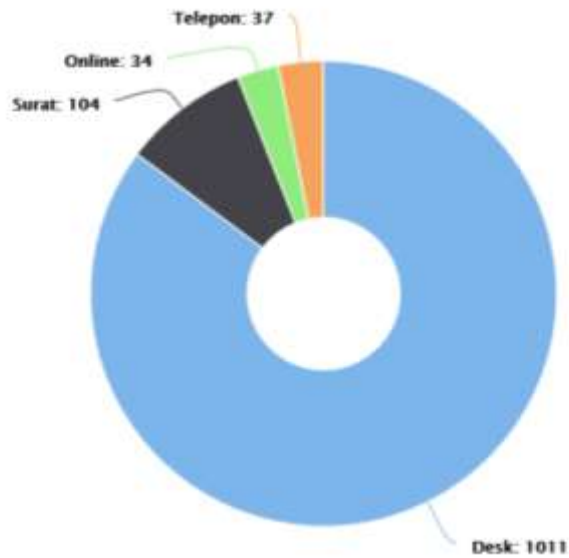
Secara keseluruhan Jumlah Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2017 dalam grafik berikut ini :



TABEL 2. REKAPITULASI SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2017

No	Bulan	Saluran Permohonan Informasi			
		Surat	Online	Telp/Faks	Desk
1	Januari	24	12	5	72
2	Februari	20	8	19	58
3	Maret	33	2	4	76
4	April	19	3	3	86
5	Mei	8	1	3	94
6	Juni	0	3	1	48
7	Juli	0	0	2	66
8	Agustus	0	1	0	149
9	September	0	0	0	121
10	Oktober	0	0	0	105
11	November	0	3	0	73
12	Desember	0	1	0	63
	Jumlah	104	34	37	1011

Secara keseluruhan Pemanfaatan Saluran Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2017 dalam grafik berikut ini :



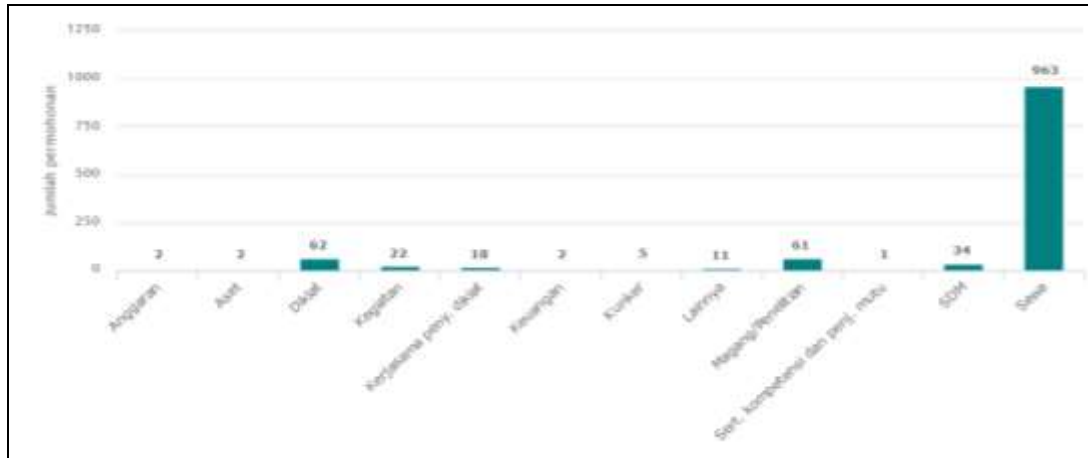
TABEL 3. REKAPITULASI PERMOHONAN JENIS INFORMASI PERIODE TAHUN 2017

No	Bulan	Klasifikasi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	1	17	0	11	0	0	8	0	6	69	2
2	Februari	0	1	9	5	6	2	3	4	1	12	57	5
3	Maret	2	0	15	12	1	0	0	2	0	1	78	3
4	April	0	0	6	4	0	0	2	2	0	11	85	0
5	Mei	0	0	5	1	0	0	0	5	0	3	91	0
6	Juni	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	48	1
7	Juli	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	61	0
8	Agustus	0	0	1	0	0	0	0	16	0	0	133	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	112	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	98	0
11	Nopember	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	72	0
12	Desember	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	59	0
	Jumlah	2	2	62	22	18	2	5	61	1	34	963	11

Keterangan :

- | | | |
|-------------|---------------------------|---|
| 1. Anggaran | 5. Kerjasama Peny. Diklat | 9. Sertifikasi Kompetensi & Penjaminan Mutu |
| 2. Aset | 6. Keuangan | 10. SDM |
| 3. Diklat | 7. Kunjungan | 11. Sewa |
| 4. Kegiatan | 8. Magang | 12. Lainnya |

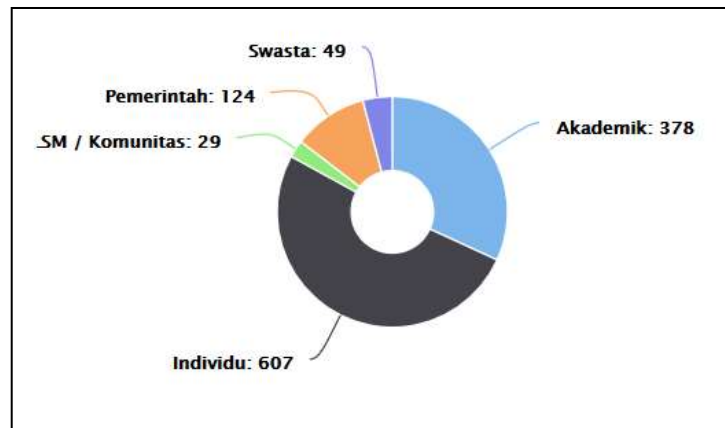
Secara keseluruhan Rekapitulasi Permohonan Jenis Informasi yang dimohonkan sepanjang Tahun 2017 dalam grafik berikut ini :



TABEL 4. REKAPITULASI KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PERIODE TAHUN 2017

No	Bulan	Pemohon Informasi				
		Lembaga Pemerintah	Akademik	Lembaga Swasta	Individu	Komunitas / LSM
1	Januari	19	19	3	71	2
2	Februari	25	15	2	62	1
3	Maret	29	27	3	51	5
4	April	19	25	3	64	0
5	Mei	9	27	0	70	0
6	Juni	2	29	0	21	0
7	Juli	3	15	3	45	2
8	Agustus	7	46	13	78	6
9	September	1	70	5	43	2
10	Oktober	6	56	9	30	4
11	Nopember	3	37	5	27	4
12	Desember	1	12	3	45	3
	Jumlah	124	378	49	607	29

Secara keseluruhan Rekapitulasi Pemohon Informasi sepanjang Tahun 2017 dalam grafik berikut ini :



d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2017, Tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA DAN REKOMENDASI

- A. Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik
1. Petugas layanan informasi belum berjalan secara optimal
 2. Belum semua pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik.
 3. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang.
 4. Masih terdapat beberapa pemohon informasi yang langsung memohon informasi ke Bidang atau sekretariat sehingga tidak tercatat dalam buku register Permohonan Informasi.
- B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi :
1. Perlu dibangun sebuah aplikasi ke-PPID-an sehingga memudahkan dalam proses tata kelola informasi publik
 2. Pelatihan khususnya untuk Tim Pendukung PPID mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap layanan informasi publik di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

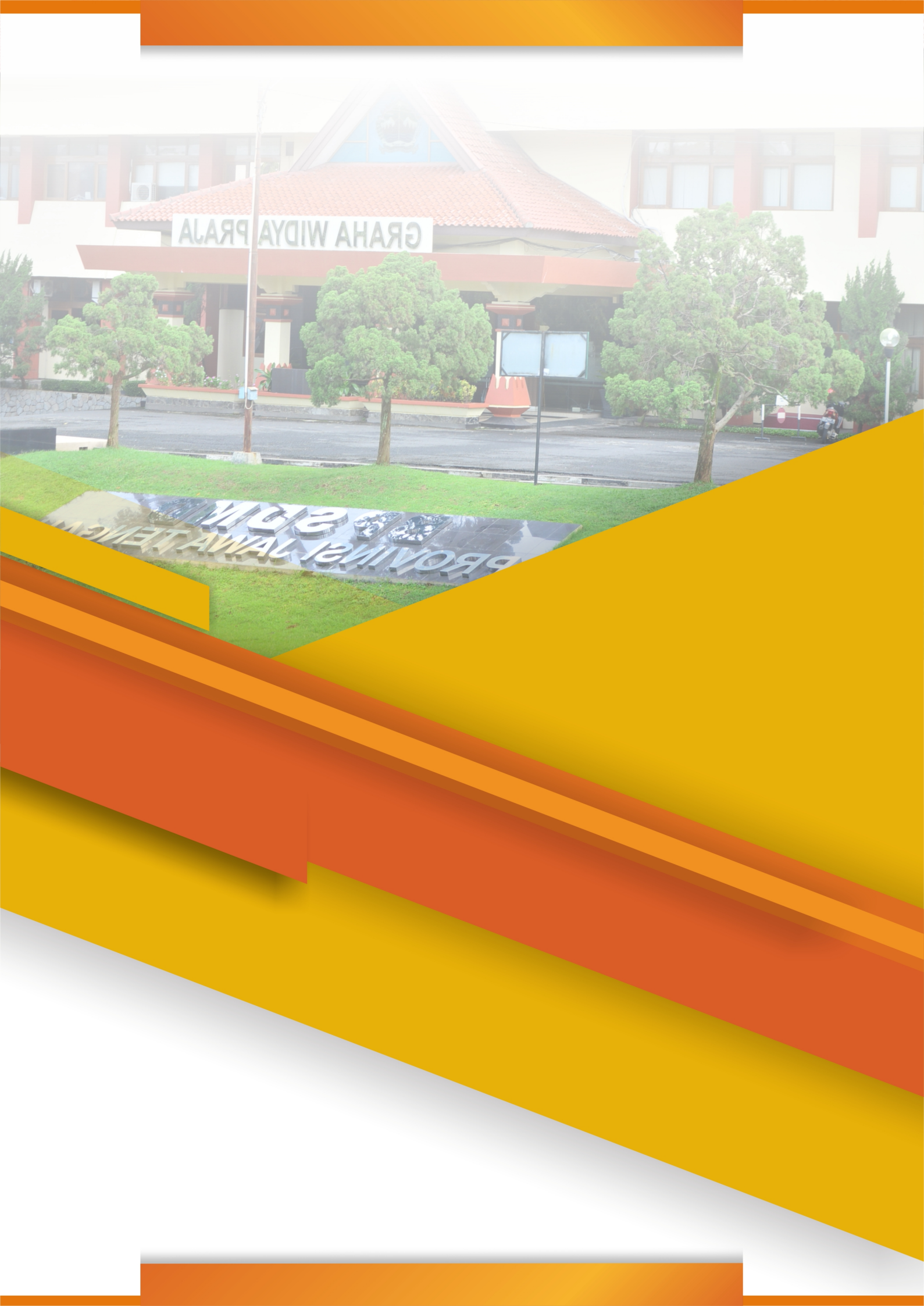
Semarang, Januari 2018

**Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

selaku
PPID Pembantu,

The image shows a circular official stamp of BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH' around the top edge, 'BPSDMD' in the center, and 'PROVINSI JAWA TENGAH' around the bottom edge. A signature is written over the stamp.

Drs. BUDI SANTOSO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600226 198411 1 001



GRAHA WIDYA PRAJA

PROVINSI JAWA TENGAH